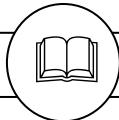


PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK

MODUL

1

Drs. Toto Priyadi
Ali Muhyidin, S.IP.



PENDAHULUAN

Modul ini berisikan dua pemikiran dan pendekatan dalam membahas mengenai sistem politik, yaitu David Easton dan Gabriel Almond. Dalam modul ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pemikiran dalam analisis sistem politik, masalah *input* dan *output* dalam sistem politik, lingkungan dalam sistem politik, dan juga akan dibahas secara singkat mengenai komunikasi dalam sistem politik.

Modul ini pertama kali membahas mengenai pemikiran Easton mengenai sistem politik yang kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Almond, terkait dengan pemikiran Almond mengenai pendekatan struktural fungsional.

Easton mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Adapun unit dalam sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Input* dalam sistem politik dapat berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi *output* (keputusan atau kebijakan). *Output* yang dihasilkan setelah melalui proses konversi, setelah ada umpan balik (*feedback*) ke lingkungan dapat menghasilkan *input* baru.

Pembahasan pemikiran Almond akan dimulai dari penjelasan mengenai pendekatan struktural fungsional, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengertian sistem. *Input*, *output*, dan lingkungan juga akan dijelaskan dalam bagian ini. Sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya. Hal lain yang akan dijelaskan juga adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem politik. Pemikiran Almond ini akan sangat berguna untuk membandingkan berbagai sistem politik yang ada di dunia, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang modern.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan landasan pemikiran sistem politik Easton;
2. menjelaskan pendekatan dalam analisis sistem politik Almond;
3. menjelaskan *input* dan *output* dalam sistem politik;
4. menjelaskan lingkungan dalam sistem politik;
5. menjelaskan komunikasi politik dalam sistem politik.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menerapkan secara benar analisis sistem politik yang mencakup berikut ini.

1. Identifikasi unit-unit dalam sistem politik.
2. Diferensiasi dalam sistem politik.
3. Integrasi dalam sistem politik.
4. Mekanisme bekerjanya sistem politik.
5. *Input*.
6. *Output*.
7. Lingkungan.

Analisis Sistem Politik menurut David Easton

Pendekatan analisis sistem politik dalam ilmu politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok dari pendekatan tingkah laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia (atau masyarakat) sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik.

Pemikiran mengenai sistem politik, tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu lain terutama dari ilmu astronomi yang melihat kejadian dalam alam raya sebagai bagian dalam tata surya ataupun ahli biologi yang melihat kejadian dalam tubuh manusia sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman sistem politik dan cara bekerjanya, mungkin akan lebih mudah apabila kita membayangkan tubuh manusia.

Apabila tubuh manusia merupakan bagian dari suatu sistem maka kita akan menemukan bagian-bagian dari sistem (subsistem) yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasa. Meskipun setiap bagian dalam tubuh manusia tersebut berbeda dan menjalankan fungsinya masing-masing, yang tentunya berbeda pula, namun tidak berarti setiap bagian tersebut menjalankan fungsinya sekehendaknya. Setidaknya terdapat komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan subsistem dalam sistem tersebut berjalan secara beriringan dengan tanpa mengacaukan subsistem yang lainnya. Lebih dari itu, hilangnya atau tidak berfungsinya salah satu subsistem dapat menyebabkan kelumpuhan sistem secara keseluruhan. Misalnya, kecelakaan yang menyebabkan manusia pincang dengan kehilangan kaki pada sisi yang ekstrim dapat menyebabkan kematian.

Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). *Pertama*, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. *Kedua*, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. *Ketiga*, sistem mengacu pada dua hal, *co-variance* dan ketergantungan antarunit yang membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem.

Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dalam sistem

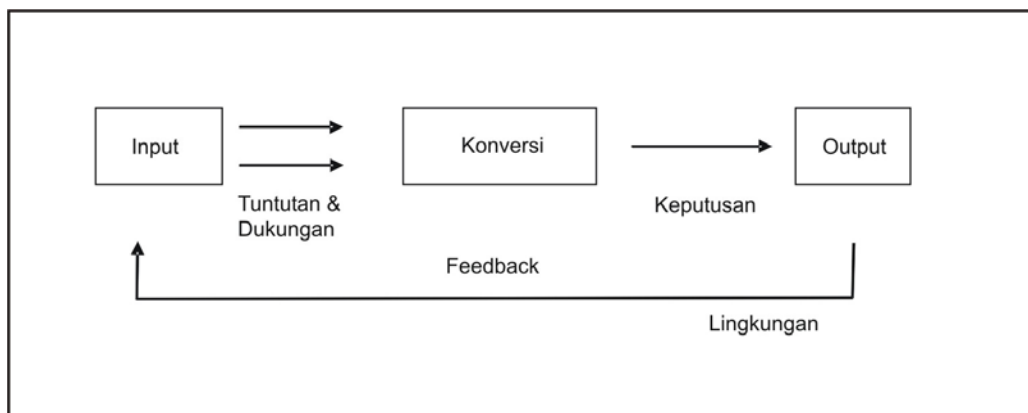
politik terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial (*the authoritative allocation of social value*). Namun, perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem dapat menjadi *input* bagi sistem yang lain, dan sebaliknya. Contohnya adalah kebijakan pajak. Kebijakan pajak merupakan *output* dari sistem politik, sekaligus dapat menjadi *input* bagi sistem ekonomi.

Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (Mas'oeed dan MacAndrews, 1991: 5-6). *Pertama*, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.

Kedua, *input* dan *output*. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan *input* yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya *input*, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa *output* kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.

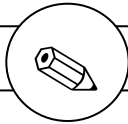
Ketiga, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Keempat, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasinya dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.



Gambar Alur Kerja Sistem Politik

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah *input*, konversi (proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195). Dari gambar di atas dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya *input* yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi *output*, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi *output*, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi *input*.



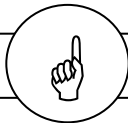
LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!

- 1) Jelaskan perbedaan utama antara sistem politik dengan sistem yang lainnya!
- 2) Jelaskan unsur yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik menurut Easton!
- 3) Jelaskan bentuk *input* dalam sistem politik!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sistem politik senantiasa berkaitan dengan tindakan pembuatan keputusan publik, sedangkan sistem yang lainnya belum tentu berkaitan dengan kepentingan publik.
- 2) Unsur yang harus diperhatikan adalah *input*, konversi (proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan.
- 3) Input dapat berbentuk tuntutan atau dukungan terhadap suatu sistem politik.



RANGKUMAN

Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta. Adapun untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain maka dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Namun demikian, batas akan dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan politik sebagai sebuah tindakan yang ingin berkaitan dengan pembuatan keputusan yang menyangkut publik.

Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Sebuah sistem dapat menjadi *input* bagi sistem yang lain.

Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antaranggotanya. Pembagian kerja yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam sistem politik.



TES FORMATIF 1

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

- 1) Pendekatan analisis sistem politik merupakan wujud dari perubahan pendekatan
 - A. kelembagaan ke tingkah laku
 - B. tingkah laku ke kelembagaan
 - C. tingkah laku ke pasca-tingkah laku
 - D. kelembagaan ke pasca-tingkah laku

- 2) Pemikiran mengenai sistem politik pada awalnya berasal dari
 - A. ilmu sosial
 - B. ilmu eksakta
 - C. ilmu psikologi
 - D. ilmu manajemen

- 3) Faktor pembeda dan batas antara sistem politik dengan sistem yang lain terletak pada
 - A. wilayah kajian
 - B. tindakan politik
 - C. ketiadaan batas yang jelas
 - D. wilayah geopolitik

- 4) Alur kerja sistem politik adalah untuk mengubah
 - A. dukungan
 - B. tuntutan menjadi dukungan
 - C. tuntutan dan dukungan untuk diproses
 - D. *input* menjadi *output*

- 5) Pengertian utama dari integrasi dalam sistem politik adalah
 - A. politisasi kegiatan politik
 - B. integrasi semua kegiatan politik
 - C. mengatur dan mengintegrasikan tindakan yang berpengaruh dalam sistem
 - D. mengatur dan mengintegrasikan semua tindakan dalam sistem

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Akan tetapi, apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Input, Output, dan Lingkungan dalam Sistem Politik

A. INPUT

Input terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya manajemen bagi *demands*. Kelebihan *demands* akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demands*, baik melalui institusi, budaya maupun struktural *gatekeepers*. Selain *demands*, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan *demands* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Dalam sistem politik, *input* diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua kebutuhan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke sistem. Hal terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk ke dalam sistem politik adalah cara penyampaian dan peranan komunikasi politik, termasuk agen yang menyampaikan tuntutan tersebut.

Dalam sistem yang demokratis, setiap orang, organisasi, dan kelompok mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan tuntutannya. Hal ini berbeda dengan negara yang tidak demokratis, di mana kesempatan dalam menyampaikan tuntutan sangat terbatas pada kelompok tertentu. Partai politik, dengan salah satu fungsinya sebagai agen dalam komunikasi politik menjadi penting peranannya dalam menyampaikan tuntutan tersebut. Apabila fungsi komunikasi partai politik yang dilanjutkan dengan agregasi (menggabungkan kepentingan) dan artikulasi (merumuskan kepentingan) tidak dapat berjalan dengan baik maka proses penyampaian tuntutan tersebut menjadi tidak terlembaga secara baik. Akibatnya muncul demonstrasi, petisi.

Tuntutan dapat berasal dari dalam sistem atau dari lingkungan luar sistem. Tuntutan eksternal dapat dengan mudah kita identifikasi karena lingkungan luar dalam pendekatan ini kita tetapkan sebagai sistem-sistem lain di luar sistem politik. Sedangkan tuntutan

internal sebenarnya bukanlah *input*, namun lebih pada sesuatu yang timbul sebagai akibat langsung dari sistem politik itu sendiri (*with input*). Dalam hal ini, tuntutan internal muncul karena adanya situasi-situasi yang terdapat dalam sistem politik itu sendiri. Pada saat sistem politik bekerja, muncul tuntutan dari anggota-anggota sistem politik untuk mengubah hubungan politik yang telah ada. Perubahan hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan hubungan-hubungan politis yang terdapat dalam sistem politik.

Adapun mengenai *input* yang berupa dukungan, tidak semata-mata berupa dukungan yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap, kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Hal ini dapat berupa kesetiaan pada partai sampai dengan semangat patriotisme.

Mengenai dukungan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

1. Wilayah Dukungan

a. Komunitas Politik

Dukungan terhadap komunitas politik dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat. Dukungan semacam ini dapat terlihat melalui pertumbuhan kesadaran dan kesatuan nasional. Sebagai contoh, seseorang akan merasa dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan menyumbangkan tenaga dan sumber daya yang dimilikinya untuk penyelesaian secara damai dari berbagai tuntutan yang berbeda.

b. Rezim

Rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan dari anggota sistem untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik.

c. Pemerintah

Artinya, ada dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas menyelesaikan beragam masalah dan konflik yang muncul di antara sesama anggota sistem.

2. Mekanisme Dukungan

Sebagaimana diketahui bahwa tanpa adanya dukungan yang relatif tetap dan *ajeg*, sistem politik tidak akan dapat menyerap energi yang cukup memadai dari anggota-anggotanya untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah keputusan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme dukungan, yaitu *output* dan sosialisasi (politisasi).

Pertama, output. Dalam sistem politik, *output* berwujud suatu keputusan atau kebijakan politik. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga ikatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Pada dasarnya semakin besar tuntutan yang dapat dipenuhi maka akan semakin baik bagi kelangsungan sistem tersebut, hanya saja dapat dipastikan bahwa sistem tidak akan dapat memenuhi semua tuntutan yang ada. Paling tidak, tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruhlah yang harus diperhatikan.

Kedua, sosialisasi (politisasi). Proses pembelajaran anggota masyarakat secara turun-temurun dalam suatu sistem politik merupakan salah satu bagian dari usaha untuk menciptakan dan mengakumulasi suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar.

Proses pembelajaran ini berlangsung secara terus-menerus, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Apabila nilai yang ditanamkan sudah mengakar sedemikian dan terlembaga maka sistem politik tersebut memiliki legitimasi yang tinggi. Sosialisasi politik ini secara efektif menciptakan dan mewariskan nilai-nilai politik dan ukuran legitimasi dari suatu generasi ke generasi yang lain.

B. OUTPUT

Demands yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (*output*). Apabila *output* sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Akan tetapi, apabila *output* yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di *output* melalui *feedback loop*. *Output* harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.

C. LINGKUNGAN

Lingkungan dalam pengertian di sini adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu *intrasocietal* dan *extrasocietal*. *Intrasocietal* merupakan komponen dalam sistem politik. *Intrasocietal* mencakup seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, serta gagasan baik dari lingkungan ekonomi, budaya maupun struktur sosial. *Intrasocietal* dalam hal ini merupakan segmen fungsional masyarakat. *Extrasocietal* mencakup semua sistem di luar suatu sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau sebuah suprasistem. Lingkungan terhadap sistem politik kadangkala dapat berupa tekanan (*disturbances*), misalnya krisis ekonomi. Sebuah sistem politik harus menjalankan variabel-variabel esensialnya untuk mengatasi tekanan dan gangguan yang ada. Variabel-variabel esensial tersebut adalah alokasi nilai bagi anggota sistem dan mengatur bagaimana agar alokasi tersebut diterima oleh sebagian besar anggota.

Lingkungan masyarakat dalam oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial. *Pertama*, sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas dan luas teritorial. Adapun kondisi nonhumanis, misalnya kekayaan alam, flora, dan fauna. Pengambil kebijakan hendaknya selalu memperhatikan kondisi lingkungan ekologi. Di Indonesia, misalnya dengan kondisi hutan yang luas hendaknya dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan nasional. Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan hutan secara benar maka negara akan mendapatkan pemasukan dana dari penjualan kayu. Sebaliknya, eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam yang ada maka akan dapat menimbulkan bencana banjir. Pada akhirnya akan menimbulkan gangguan bagi sistem politik.

Kedua, sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Asumsi dasarnya adalah susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan

suatu perilaku tertentu pula. Kebenaran dari asumsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Penelitian yang sering dilakukan adalah mengenai karakter bangsa dan pengaruhnya terhadap masalah nasional.

Keempat, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial. Budaya politik secara sederhana diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya. Dengan demikian, budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut. Terkait dengan budaya politik, umumnya masyarakat dikelompokkan dalam berbagai tipe, mulai dari masyarakat yang acuh terhadap politik sampai dengan masyarakat yang sangat aktif. Kajian dan penelitian mengenai budaya politik sering dikaitkan dengan tingkat partisipasi suatu masyarakat. Sistem politik hendaknya dapat mengatur budaya politik, termasuk partisipasinya sehingga tidak merugikan. Jangan sampai yang muncul adalah beban yang berat dalam menampung partisipasi politik yang ada sehingga sistem politik tersebut hancur.

Terkait dengan sistem ekonomi, sistem ekologi dan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup penting. Kebijakan ekonomi makro, jangan sampai bersifat eksploitatif sehingga menguras sumber daya alam yang ada dan merugikan lingkungan. Hal yang sama pun berlaku dalam hal pemanfaatan teknologi. Adanya limbah industri, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan adalah contoh-contoh dari kebijakan ekonomi yang tidak seimbang. Di Indonesia, kita dapat melihat beberapa contoh kebijakan ekonomi yang tidak selaras yang kemudian memunculkan berbagai tuntutan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, Peristiwa Malari tahun 1974, kasus limbah industri PT Newmont, dan yang paling kontemporer adalah dibukanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Bojong Depok, Jawa Barat yang memunculkan kecaman cukup keras dari masyarakat.

Sistem demografi merujuk pada keadaan penduduk, baik jumlah, komposisi, sampai dengan distribusi penduduk maupun pada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Perubahan dalam sistem demografi akan berpengaruh pada sistem politik. Misalnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat atau distribusi penduduk yang tidak merata maka akan menimbulkan gangguan pada sistem politik. Adanya pertumbuhan dan akumulasi penduduk di Pulau Jawa menuntut kebijakan yang proporsional. Kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan, yang pada akhirnya akan memunculkan gangguan dalam sistem tersebut.

Adapun lingkungan luar dibagi menjadi tiga, yaitu sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional.

Sistem politik internasional dalam hal ini dapat dilihat sebagai sistem politik individu atau pengelompokan sistem individu. Hal yang dimaksud dalam sistem individu dalam hal ini adalah sistem politik dari masyarakat lain. Adapun pengelompokan sistem individu, misalnya NATO, ASEAN, dan PBB. Dengan demikian adanya lingkungan luar ini maka akan menimbulkan hubungan bilateral (antarnegara), multilateral (banyak negara) ataupun internasional. Dalam hubungan ini, masing-masing sistem akan selalu berupaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Misalnya, hubungan antara

Indonesia dan Jepang; Jepang berupaya mendapatkan pasar dan bahan dasar industri yang murah dari Indonesia. Adapun pihak Indonesia selalu berupaya agar hasil-hasil industri dari Jepang, harga dan teknologinya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Sistem ekologi internasional mencakup semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi nonhumanis dari masyarakat internasional. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekologi global akan berpengaruh terhadap sistem politik. Misalnya, apabila harga minyak dunia naik maka secara langsung berpengaruh pada kebijakan nasional Indonesia tentang BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada saat yang sama ketika harga minyak dunia sedang stabil atau turun maka pemerintah Indonesia pun akan melakukan kebijakan penyesuaian.

Adapun mengenai sistem sosial internasional, Easton membaginya dalam struktur sosial internasional, sistem kebudayaan internasional, dan sistem ekonomi internasional. Terkait dengan pengaruh lingkungan luar terhadap suatu sistem politik, tergantung pada sisi mana saja yang menjadi pusat perhatian kita. Dalam bahasan mengenai sistem politik Indonesia maka pengaruh lingkungan dalam akan mendapat perhatian yang lebih besar dibanding dengan pengaruh lingkungan luar.

Dukungan diperlukan untuk menjaga kelangsungan setiap sistem politik. Indikator dukungan ini dapat diukur dengan cara bertanya pada setiap anggota kelompok tentang orientasi apa yang lebih dipilih: bekerja sama menyelesaikan masalah secara damai sehubungan tuntutan-tuntutan mereka yang saling berbeda atau sebaliknya. Dukungan dalam sistem politik juga mampu membantu memberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem tersebut. Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana *input* diolah menjadi *output* yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah.

Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengategorikan analisis sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

1. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku.
2. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.
3. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain.
4. Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.

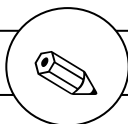
D. KRITIK TERHADAP ANALISIS SISTEM POLITIK DAVID EASTON

Disadari sepenuhnya bahwa analisis sistem politik menurut David Easton sangat membantu dalam memahami bekerjanya sistem politik, namun ada dua kritik terhadapnya.

Pertama, terlalu umum, *too transparently axiomatic to be of real use*, masih bersifat teoretis. Operasionalisasi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Easton tidaklah mudah karena dalam kenyataannya dibutuhkan berbagai macam atribut (agama, budaya, sosial, ekonomi, dan ideologi), selain *demands* dan *support* dalam konversi (proses). Selain itu, untuk melaksanakan konsep Easton harus mempertimbangkan perkembangan sejarah

sistem tersebut. Tanpa mempertimbangkan hal-hal di atas, akan sulit membedakan antara situasi krisis dan normal, tuntutan utama dan marginal.

Kedua, tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal. Gagasan Easton akan sulit digunakan untuk menganalisis masyarakat yang sedang berkembang dan membandingkan berbagai sistem politik yang ada.



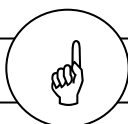
LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!

- 1) Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyalurkan *input* sistem politik!
- 2) Jelaskan jenis lingkungan yang terdapat dalam sistem politik!
- 3) Jelaskan kritik yang muncul terhadap analisis sistem politik David Easton!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyalurkan *input* sistem politik adalah wilayah dukungan dan mekanisme dukungan.
- 2) Jenis lingkungan yang terdapat dalam sistem politik adalah lingkungan dalam (*intra societal*) dan lingkungan luar (*extra societal*).
- 3) Kritik terhadap analisis sistem politik David Easton *pertama*, terlalu umum, *too transparently axiomatic to be of real use*, masih bersifat teoretis. *Kedua*, tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal.



RANGKUMAN

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. *Input* yang berupa tuntutan muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat (kebutuhan). *Input* tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam sistem politik jika tidak terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi politik menjadi bagian penting dalam hal ini. Terdapat perbedaan tipe komunikasi politik di negara yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe komunikasi politik ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya peranan dari organisasi politik.

Output merupakan keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi *input* yang masuk. *Output* sering dimanfaatkan sebagai mekanisme dukungan dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan yang muncul.

Lingkungan mempunyai peranan penting berupa *input*, baik tuntutan ataupun dukungan. Kemampuan anggota sistem politik dalam mengelola dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan semua sistem lain yang tidak termasuk dalam sistem politik. Secara garis besar, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam (*intra societal*) dan lingkungan luar (*extra societal*).

Setidaknya ada dua kritik yang dilontarkan atas gagasan Easton, yaitu adanya anggapan bahwa pemikiran Easton terlalu teoretis sehingga sulit untuk diaplikasikan secara nyata. Selain terlalu teoretis, pemikiran Easton dianggap tidak netral karena hanya mengedepankan nilai-nilai liberal Barat dengan tanpa memperhatikan kondisi pada masyarakat yang sedang berkembang.



TES FORMATIF 2

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

- 1) Mekanisme atau cara untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan cara
 - A. *output* dan sosialisasi sebagai mekanisme dukungan
 - B. *input* sebagai mekanisme dukungan
 - C. *output* sebagai mekanisme dukungan
 - D. *konversi* sebagai mekanisme dukungan

- 2) Pengertian utama *re-newed support* adalah
 - A. pembaharuan dukungan
 - B. pembaharuan masyarakat
 - C. pembaharuan pikiran
 - D. *output* dan *input* sekaligus

- 3) Berikut ini yang termasuk pengertian lingkungan dalam (*intra societal*) adalah
 - A. semua sistem sosial dan fisik yang berada di luar sistem politik, akan tetapi masih berada dalam masyarakat yang sama
 - B. semua sistem sosial dan fisik yang berada dalam sistem politik, akan tetapi ada di luar masyarakat yang bersangkutan
 - C. semua sistem sosial dan fisik yang berada dalam lingkungan masyarakat
 - D. semua sistem sosial dan fisik dari masyarakat lain

- 4) Berikut termasuk pengertian lingkungan masyarakat dalam, *kecuali*
 - A. sistem ekologi
 - B. sistem biologi
 - C. sistem sosial
 - D. sistem ekonomi internasional

- 5) Salah satu kritik terhadap analisis sistem Easton adalah adanya anggapan bahwa model yang digagasnya *tidak netral*, artinya
- bercampur aduk dengan model yang lain
 - hanya mengedepankan nilai liberal
 - pemikirnya bukan dari orang Timur
 - tidak demokratis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

- 90 - 100% = baik sekali
- 80 - 89% = baik
- 70 - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Akan tetapi, apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond

A. SISTEM POLITIK, LINGKUNGAN, DAN KAPABILITAS

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dari sistem kehidupan manusia.

Analisis pendekatan struktural fungsional ini dimulai dengan penjelasan mengenai sistem politik sebagaimana diperkenalkan oleh Gabriel Almond. Dalam teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Talcott Parsons mengembangkan apa yang disebut *grand theory* (teori besar) dalam sosiologi yang lazim disebut sebagai *Fungsionalisme Struktural*. Salah satu teori dasar Parsons menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling bergantung (*interdependen*). Setiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara *division of labor* (pembagian kerja), dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara integratif dan melalui pertukaran-pertukaran di antara bagiannya, serta menciptakan suatu keseimbangan untuk mempertahankan eksistensi sistem tersebut.

Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Dari penjelasan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang utama dalam sebuah sistem politik (1) sistem politik merupakan sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka. Dengan demikian, sistem politik terdapat dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern. Aktor-aktornya pun sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing; (2) tujuan sistem politik adalah untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat (integrasi). Selain itu, sistem politik juga dapat menyesuaikan (*adaptif*) terhadap lingkungannya. Jadi selain berfungsi untuk menyatukan masyarakat, sistem politik diperlukan untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat di luar sistem politik; (3) sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan dan paksaan fisik.

Penggunaan kekuatan dan paksaan fisik, dalam kadar yang berbeda dapat dilihat dalam sistem politik yang totaliter dan sistem politik demokratis. Dalam sistem politik yang totaliter, paksaan fisik sangat dominan dalam alokasi nilai dan kebijakan. Berbeda dengan sistem politik yang demokratis, penggunaan paksaan fisik hanya dalam batas tertentu dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi *input* dan *output*. Termasuk dalam kategori fungsi *input* adalah sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi *output* terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan. Lebih lanjut Almond menulis:

“All of the functions performed in the political system – political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, rule adjudication – are performed by means of communication”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa komunikasi bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan.

Komunikasi politik versi Almond beranggapan bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat). Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Perbedaan utama antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah cara penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur (lembaga) yang terlibat dalam arus informasi tersebut (Rauf, 2000: 132-133).

Arus komunikasi dari atas ke bawah terjadi bila penguasa politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggota-anggota masyarakat. Bagi Almond, proses tersebut bersifat universal karena tidak ada penguasa yang tidak menyampaikan pesan-pesan kepada rakyatnya, baik itu dalam bentuk peraturan maupun perintah-perintah (Rauf, 2000: 133).

Adapun mengenai interaksi antara sistem politik dengan lingkungan, antara Easton dan Almond tidak terdapat perbedaan dalam pembagian lingkungan dalam (*intrasocietal*) dan lingkungan luar (*extrasocietal*). Sistem politik selalu berinteraksi dengan lingkungan. Pengaruh yang berasal dari lingkungan luar (*input*) berdampak pada sistem dan sebaliknya, sistem politik mempengaruhi pula lingkungannya (*output*).

B. SISTEM DAN LINGKUNGAN: SUATU PENDEKATAN EKOLOGIS

Pada dasarnya pendekatan sistem politik yang digagas oleh Almond merupakan pendekatan perbandingan sistem politik. Menurut Almond, dalam membandingkan lembaga dan proses-proses politik yang terdapat di dalamnya, setidaknya dapat dilakukan dalam tiga tahapan (1) kegiatan deskriptif, dengan melihat dan memusatkan perhatian pada keseluruhan bagian dari sistem politik tersebut; (2) memilah-milah temuan yang

didapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing; (3) dicari *keajegan* dari hubungan-hubungan dari berbagai variabel, misalnya antara sistem sosial dengan konflik yang ada.

Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. *Sistem* diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong suatu usaha yang mengarah pada suatu perdamaian, memajukan perdangangan internasional ataupun membatasinya, membuka diri atau menutup diri dari semua gagasan.

Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau *struktur-struktur*, misalnya: parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau *fungsi-fungsi* tertentu, selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya. Konsep di atas ini, semuanya merupakan bagian dari proses yang sama.

Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk dapat memahami bagaimana sistem politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan alam dan manusianya. Komponen tersebut merupakan komponen konseptual dari suatu pendekatan ekologis terhadap politik.

Keuntungan dari perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas. Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya sebuah pilihan politik. Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling bergantung.

Selanjutnya, bahasan mengenai hubungan sistem dengan lingkungan, akan diberikan beberapa ilustrasi contoh. Dalam masyarakat yang agraris, tertutup, dalam lingkungan pedesaan, disertai dengan tingkat mobilitas yang rendah akan sulit untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Tidak adanya interaksi dengan sistem lain di luar masyarakat, menjadikan isolasi sistem tersebut terhadap perubahan. Dalam sistem tersebut kecenderungan yang akan terjadi adalah munculnya rezim tradisional agama ataupun adat dalam semua kehidupan.

Berbeda dengan sistem politik dengan negara yang modern. Adanya interaksi dengan lingkungan internasional memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan dua contoh, yaitu isu demokratisasi dan terorisme. Demokrasi dan demokratisasi adalah isu global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Indonesia, sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan prosedur-prosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis. Pemilu, sebagai salah satu prosedur demokrasi, di Indonesia tidak dapat lepas dari lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga internasional atau negara asing yang *mengontrol*

jalannya Pemilu. Lebih dari itu, bantuan dana pun kerap diberikan oleh negara atau lembaga asing tersebut. Sebagai konsekuensi dan kekhawatiran yang muncul adalah adanya *intervensi* dari lingkungan luar. Adapun pengaruh ke luar terkait dengan isu demokratisasi ini adalah adanya kontrol dan proses yang diberikan pada kebijakan-kebijakan negara lain yang dianggap telah melanggar nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya, protes masyarakat Indonesia terhadap *invasi* AS ke Irak.

Isu lain yang cukup santer terkait dengan pengaruh lingkungan luar adalah masalah terorisme. Berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme menjadi perhatian pada hampir semua negara di dunia. Bahkan sampai ada anggapan terorisme sebagai gejala dan jaringan global pun kerap disimpulkan. Indonesia sebagai bagian dari lingkungan internasional yang dipengaruhi oleh isu tersebut harus menyesuaikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah membuat Undang-Undang tentang terorisme.

Keuntungan pendekatan ekologis ini adalah dapat mengarahkan pada perhatian dan isu politik yang lebih luas. Pendekatan ini dapat mencegah kita untuk memberikan penilaian yang tergesa-gesa dan penuh prasangka. Ketika kita ingin memberikan penilaian yang objektif terhadap suatu sistem maka kita harus dapat menempatkan sistem tersebut dalam lingkungannya untuk dapat melihat bagaimana lingkungan tersebut membatasi atau memperlancar pilihan politik yang ada. Pada sisi yang lain, misalnya kita mengetahui ada negara yang eksploitatif terhadap sumber alamnya, kita tidak dapat langsung *menjustifikasi* bahwa negara tersebut buruk. Bisa jadi, eksploitasi tersebut adalah tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik yang disertai pula dengan tekanan dari negara yang ada di sekitarnya.

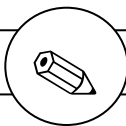
C. KAPABILITAS SISTEM POLITIK

Almond menyebutkan enam kategori untuk menentukan kapabilitas suatu sistem politik. Kapabilitas suatu sistem politik merupakan kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya (1) kapabilitas ekstraktif, misalnya mengumpulkan sumber-sumber alami dan manusiawi; (2) kapabilitas regulatif, misalnya arus kontrol dari sistem politik tersebut terhadap kelompok atau individu; (3) kapabilitas distributif, misalnya alokasi barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan kerja; (4) kapabilitas simbolik, misalnya pameran kekuatan dari kekuasaan pada saat kritis; (5) kapabilitas responsif, misalnya menyangkut hubungan antara *input* dari masyarakat dengan *output* yakni kebijaksanaan dari sistem politik; (6) kapabilitas domestik dan internasional. Penjelasan dari setiap kapabilitas itu adalah sebagai berikut:

1. Kapabilitas Ekstraktif

Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik untuk mengelola sumber-sumber material dari lingkungan dalam maupun luar. Hal ini berkaitan dengan kuantitas sumber yang masuk ke dalam sistem politik. Misalnya, pendapatan daerah. Ukuran lainnya meliputi kekayaan alam, jumlah penduduk, dan sarana untuk mencapai kemampuan. Dengan kata lain, kapabilitas ekstraktif berhubungan dengan potensi yang dimiliki suatu sistem politik dalam mencapai tujuannya.

2. **Kapabilitas Regulatif**
Kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu atau kelompok yang berada dalam sistem. Caranya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan tertentu.
3. **Kapabilitas Distributif**
Kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan sumber-sumber material dan jasa kepada individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Tinggi rendahnya kapabilitas distributif ditentukan oleh kuantitas, nilai, bidang-bidang kehidupan manusia yang diuntungkan dengan adanya distribusi tersebut.
4. **Kapabilitas Simbolis**
Kemampuan sistem politik dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun kunjungan kenegaraan. Minimnya kepercayaan terhadap simbol-simbol tersebut dapat menimbulkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara.
5. **Kapabilitas Responsif**
Kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan maupun dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Semakin tinggi tingkat kepekaan suatu sistem politik terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut, semakin baik pula kapabilitas responsifnya.
6. **Kapabilitas Domestik dan Internasional**
Kapabilitas ini mencakup kegiatan atau tindakan yang terkait dengan perdagangan internasional, penetrasi politik ke negara lain, misalnya lobi politik Yahudi di Amerika, IMF, pinjaman luar negeri.



LATIHAN

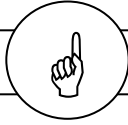
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!

- 1) Jelaskan peranan dan pentingnya komunikasi politik dalam sistem politik!
- 2) Jelaskan keuntungan pendekatan ekologis dalam sistem politik!
- 3) Jelaskan kapabilitas yang dimiliki sistem politik dalam mengatasi semua pengaruh yang berasal dari lingkungan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya (sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan peradilan dari pelaksanaan aturan) dijalankan.
- 2) Keuntungan pendekatan ekologis adalah dapat mengarahkan pada perhatian dan isu politik yang lebih luas.

- 3) Kapabilitas yang dimiliki sistem politik terdiri dari kapabilitas ekstraktif, kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, kapabilitas domestik dan internasional.



RANGKUMAN

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis dalam mempelajari sistem politik, pada awalnya adalah pengembangan dari teori struktural fungsional dalam sosiologi. Dalam pendekatan ini, sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka yang melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadapan-hadapan dengan masyarakat lainnya). Semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, fungsi *input* dan *output*.

Terkait dengan hubungannya dengan lingkungan, perspektif yang digunakan adalah ekologis. Keuntungan dari perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas. Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya sebuah pilihan politik. Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling bergantung. Untuk dapat mengatasi pengaruh lingkungan, Almond menyebutkan enam kategori kapabilitas sistem politik, yaitu kapabilitas ekstraktif, kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, kapabilitas domestik dan internasional.



TES FORMATIF 3

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

- 1) Pendekatan struktural fungsional yang digagas oleh Almond berasal dari bidang ilmu
 - A. politik
 - B. laku
 - C. psikologi
 - D. sosiologi

- 2) Persamaan yang dimiliki oleh semua sistem politik dapat dilihat dari
 - A. strukturnya
 - B. struktur dan fungsi politiknya
 - C. lembaga-lembaga politiknya
 - D. partai politiknya

- 3) Menurut Almond, *input* mempunyai beberapa fungsi, *kecuali*
 - A. komunikasi politik
 - B. sosialisasi politik
 - C. artikulasi kepentingan
 - D. pembuatan peraturan

- 4) Sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk tanggap terhadap tuntutan atau tekanan yang berasal dari lingkungan. Kemampuan ini termasuk dalam kategori kapabilitas
 - A. responsif
 - B. simbolis
 - C. ekstraktif
 - D. distributif

- 5) Konsep dasar yang digunakan untuk analisis sistem dengan menggunakan pendekatan struktural fungsional adalah
 - A. sistem
 - B. struktur
 - C. sistem dan struktur
 - D. sistem, struktur, dan fungsi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Akan tetapi, apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Analisis Struktural Fungsional dalam Sistem Politik

Dalam menjelaskan teori struktural fungsional, Almond menilai bahwa setidaknya terdapat empat ciri dalam semua sistem politik. Empat ciri inilah yang kemudian menjadi dasar dari teorinya adalah sebagai berikut.

1. Sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Dalam masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern memiliki struktur dan lembaga politik yang dapat diperbandingkan sesuai dengan tingkat dan bentuknya.
2. Sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda. Perbedaan frekuensi ini terjadi karena perbedaan struktur. Fungsi dan struktur sistem politik pun dapat diperbandingkan, mengenai bagaimana proses berjalannya dan proses penyelenggaraannya.
3. Struktur politik menjalankan fungsi tertentu. Betapa pun khusus fungsi dari sistem politik, ia akan dapat bersifat multifungsi. Dengan demikian, sistem politik dapat diperbandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi dalam struktur tersebut.
4. Sistem politik merupakan sistem campuran apabila dilihat dari segi budaya. Hal ini berarti tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang paling modern dan paling tradisional karena keduanya hanya bersifat relatif saja.

Lebih lanjut Almond menyatakan bahwa dalam sebuah sistem politik setidaknya terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Pada dasarnya klasifikasi enam struktur ini mengandung kelemahan karena tidak dapat membantu kita untuk dapat membandingkan sistem politik dengan sistem politik yang lain. Menurut Almond untuk dapat membandingkan sebuah sistem politik dengan sistem politik yang lain maka cara yang dapat digunakan adalah dengan mengetahui cara bekerja keseluruhan sistem.

Pengklasifikasian dalam enam struktur ini mengandung kelemahan karena tidak membantu kita dalam membandingkan suatu sistem politik dengan sistem yang lain secara baik dan mendalam. Analisis struktural hanya akan memberikan pengetahuan pada kita tentang jumlah partai politik, anggota dewan dalam legislatif, bentuk sistem pemerintahan suatu sistem politik, dan bagaimana eksekutif, yudikatif, serta pengorganisasian birokrasi berjalan.

A. STRUKTUR ATAU LEMBAGA POLITIK

Struktur umum yang dimiliki oleh sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Kelemahan klasifikasi ini adalah tidak terlalu membantu dalam membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Misalnya, kita akan membandingkan antara Indonesia dengan Inggris, keduanya memiliki keenam jenis struktur atau lembaga politik tersebut. Hanya saja struktur tersebut tidak sepenuhnya sama. Kedua negara ini memiliki legislatif, di Inggris dengan dua kamar, *House of Common* dan *House of Lord*, sedangkan di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Indonesia menggunakan sistem presidensial, sedangkan Inggris menggunakan sistem parlementer. Inggris dengan dua partai dan Indonesia dengan multipartai. Dari perbandingan tersebut secara singkat mungkin dapat dilihat perbedaan yang ada. Namun, persamaan dan perbedaan yang penting tidak akan dapat dilihat dari perbandingan tersebut. Hanya dengan melihat peran yang dijalankan dari lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya suatu sistem yang lebih luas, baru kita dapat melihat persamaan dan perbedaan yang muncul. Misalnya, untuk dapat mengetahui perkembangan dari jumlah partai politik dari kedua negara tersebut maka kita dapat menelusurinya dari sistem kepartaian, sistem Pemilu, sampai dengan sejarah terbentuknya partai politik dari kedua negara tersebut. Dengan cara tersebut kita akan mengerti perbedaan dan persamaan yang ada. Kita dapat melihat peran apa saja yang dimainkannya oleh lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya sistem yang lebih luas. Dari perbandingan inilah kita akan temukan persamaan dan perbedaan yang penting tersebut.

B. STRUKTUR DAN FUNGSI

Kita akan memperoleh lebih banyak informasi apabila kita memisahkan struktur dan fungsi, serta menelaah hubungan keduanya dalam berbagai sistem politik yang berbeda. Namun, harus diingat bahwa perbandingan struktur ataupun fungsi tidak dapat dipakai secara terpisah untuk menganalisis sistem politik.

Menurut Almond suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir serta secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut Almond sistem politik menjalankan fungsi sosial politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu dijalankan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan *inherent* dalam setiap sistem politik.

Penerapan kebijakan pemerintah, *output*, mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan dalam sistem

politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik pada masyarakat. Dengan demikian, konsep fungsional akan dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijakan umum yang ditempuhnya. Dengan memahami fungsi-fungsi ini maka kita akan dapat membandingkan dari beberapa sistem politik. Misalnya, kita bandingkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk membandingkan kedua negara tersebut kita dapat melihat struktur politik yang ada, dan bagaimana struktur politik tersebut dapat menjalankan fungsi politiknya masing-masing. Dengan perbandingan ini kita akan dapat melihat bahwa penyebaran fungsi politik lebih merata di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, setiap struktur atau lembaga politik menjalankan fungsi politik minimal satu. Sedangkan di Uni Soviet, ada satu atau dua struktur (partai dan birokrasi) yang menjalankan semua fungsi politik dan ada struktur yang hampir tidak berfungsi sama sekali. Kita dapat melihat, misalnya fungsi dari organisasi atau kelompok kepentingan yang ada di Uni Soviet, hanya menjalankan fungsi sosialisasi politik. Kelompok tersebut tidak dapat menjalankan fungsi rekrutmen atau komunikasi politik. Hal lain misalnya kita dapat melihat bahwa parlemen di Amerika Serikat lebih fungsional daripada di Uni Soviet.

C. FUNGSI *INPUT* DAN *OUTPUT*

Dalam menjelaskan fungsi *input* dan *output* sistem politik, hal yang perlu untuk dipahami adalah adanya konversi sebagai suatu proses yang menandai bekerjanya sebuah sistem politik. Dalam konversi ini terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun organisasi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Almond mengelompokkan fungsi *input* dan *output* dalam beberapa bagian.

1. Fungsi *Input*

- a. Sosialisasi politik dan rekrutmen politik.
- b. Artikulasi kepentingan.
- c. Agregasi kepentingan.
- d. Komunikasi politik.

2. Fungsi *Output*

- a. Pembuatan kebijakan.
- b. Penerapan kebijakan.
- c. Penghakiman kebijakan.

D. SOSIALISASI POLITIK

Secara sosiologis, sosialisasi merupakan proses di mana nilai-nilai aktual yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai ideal ditanamkan dalam objek tertentu. Sosialisasi politik secara khusus membentuk sikap dan pola tingkah laku politik seseorang. Dalam hal ini, sosialisasi politik berperan sebagai sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan keyakinan-keyakinan politik yang dianutnya kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik berlangsung secara berkesinambungan. Individu diharapkan dapat mengetahui, memahami, serta menghayati nilai-nilai politik tertentu.

Proses sosialisasi politik dapat bersifat *manifest* (nyata) ataupun *latent* (tidak nyata). Sosialisasi politik yang bersifat nyata merupakan transmisi nilai dalam wujud informasi, sikap, pandangan, serta keyakinan politik secara eksplisit. Sedangkan sosialisasi politik yang tidak nyata mengacu pada proses di mana seseorang pada awalnya memperoleh nilai yang non-politis. Nilai-nilai non-politis tersebut, kemudian mempengaruhi keyakinan, cara pandang, serta sikapnya di bidang politik.

Sosialisasi politik dapat memelihara kebudayaan politik masyarakat—yang berkaitan dengan upaya konservatif dalam memelihara *status quo*—sekaligus mengubah suatu budaya politik tertentu sehingga tercipta kebudayaan politik baru. Dalam upaya transmisi nilai-nilai politik, dibutuhkan sarana yang disebut agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik yang umum di antaranya adalah keluarga, *peer group* (teman dekat), sekolah, media massa, partai politik, LSM, pemerintah, serta organisasi politik.

E. REKRUITMEN POLITIK

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan karier politik seseorang. Melalui karier politik tersebut, orang yang bersangkutan diharapkan dapat menjalani proses seleksi untuk mengisi lowongan dalam jabatan politik dan pemerintahan. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka, artinya rekrutmen politik tersebut ditujukan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan politik dalam sistem rekrutmen tertutup. Individu yang direkrut biasanya yang memiliki hubungan cukup erat dengan penguasa atau elite berdasarkan persamaan darah, kedekatan suku, agama ataupun ideologi.

F. ARTIKULASI KEPENTINGAN

Pada dasarnya, artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Lazimnya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut dikemukakan secara nyata melalui organisasi dan lembaga yang ada. Dalam masyarakat yang maju, pengartikulasian kepentingan masyarakat dilakukan oleh kelompok kepentingan, misalnya serikat buruh. Namun, kelompok kepentingan semacam itu belum terlalu berperan di negara-negara berkembang. Peran mereka biasanya dijalankan oleh penguasa atau tokoh masyarakat setempat.

G. AGREGASI KEPENTINGAN

Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang fungsinya memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan. Kepentingan yang telah diartikulasikan ini digabungkan dan dikelola sedemikian rupa dalam tingkat pembuatan keputusan sehingga menghasilkan sebuah alternatif kebijakan tertentu. Artikulasi, agregasi maupun pembuatan keputusan dapat dilakukan oleh satu struktur; Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa batasan antara ketiganya sangat tipis.

H. KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. Pesan atau informasi tersebut dapat berupa lambang, kata-kata lisan maupun tulisan, serta isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu.

Fungsi komunikasi politik dapat bersifat formal maupun informal. Formal apabila informasi disampaikan melalui media formal, seperti radio, televisi, partai politik, dan sebagainya. Informal apabila proses penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui tatap muka (interpersonal). Misalnya, lobi politik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah.

I. PEMBUATAN KEPUTUSAN

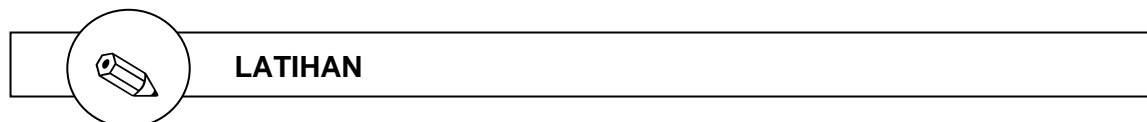
Pembuatan keputusan (*rule making*) adalah salah satu fungsi *output*. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa proses pembuatan keputusan terdiri atas beberapa tahap sebelum ia melahirkan kebijakan tertentu. Tahapan tersebut mencakup artikulasi dan agregasi kepentingan. Biasanya, keputusan politik termaktub dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif bekerja sama dengan pemerintah.

J. PENERAPAN KEPUTUSAN

Penerapan keputusan (*rule application*) adalah proses menjalani peraturan yang telah ditetapkan. Lazimnya, fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif.

K. PENGHAKIMAN KEPUTUSAN

Penghakiman keputusan (*rule adjudication*) adalah proses menghakimi tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, fungsi ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atas peraturan-peraturan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan namanya maka lembaga yang berwenang menjalankan fungsi ini adalah lembaga yudikatif.

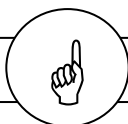


Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!

- 1) Jelaskan empat ciri sistem politik yang menjadi dasar dari teori Almond!
- 2) Jelaskan enam struktur yang harus dimiliki sistem politik menurut Almond!
- 3) Jelaskan kelemahan pendekatan struktural Almond!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Empat ciri sistem politik tersebut adalah: (a) Sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. (b) Sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda. (c) Struktur politik menjalankan fungsi tertentu. (d) Sistem politik merupakan sistem campuran apabila dilihat dari segi budaya.
- 2) Keenam struktur tersebut adalah kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan.
- 3) Kelemahan pendekatan struktural Almond adalah tidak membantu kita dalam membandingkan suatu sistem politik dengan sistem yang lainnya secara baik dan mendalam.



RANGKUMAN

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut.

Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan.

Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan *output*, berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok ataupun organisasi. Fungsi *input*, meliputi sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi *output*, antara lain pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.



TES FORMATIF 4

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

- 1) Sistem politik berkembang dari tradisional menjadi modern. Perbedaan utama sistem politik yang tradisional dan modern terletak pada
 - A. bentuknya
 - B. struktur politiknya
 - C. struktur dan fungsinya
 - D. fungsi dari struktur politik

- 2) Salah satu pemikiran Almond adalah sistem politik merupakan campuran apabila dilihat dari segi budaya. Makna yang terkandung dari pemikiran ini adalah
 - A. sistem politik yang ada sekarang ini adalah modern
 - B. semua sistem politik adalah bagian dari kebudayaan manusia
 - C. tidak ada sistem politik yang modern ataupun tradisional, semuanya adalah sama
 - D. tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang semuanya bersifat modern serta yang tradisional dikatakan semuanya primitif

- 3) Almond membagi struktur dan lembaga politik menjadi enam, *kecuali*
 - A. masyarakat
 - B. partai politik
 - C. badan eksekutif
 - D. kelompok kepentingan

- 4) Kelebihan analisis struktural Almond adalah dapat membantu kita untuk melihat jumlah partai, bentuk pemerintahan, pengorganisasian badan eksekutif, legislatif maupun birokrasinya. Namun, klasifikasi enam struktur Almond tetap memiliki kelemahan, di antaranya
 - A. tidak *fair* karena relatif dalam budaya
 - B. hanya memberikan pengetahuan mengenai jumlah partai politik
 - C. tidak membantu kita dalam membandingkan sistem politik dengan sistem yang lain
 - D. hanya memberikan dasar dalam perbandingan sistem politik dari negara yang modern dan demokratis

- 5) Pengertian struktur menurut Almond adalah
 - A. lembaga politik
 - B. susunan politik
 - C. sistem politik
 - D. fungsi politik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

- 90 - 100% = baik sekali
- 80 - 89% = baik
- 70 - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Akan tetapi, apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A Kelembagaan ke tingkah laku.
- 2) B Ilmu eksakta.
- 3) B Tindakan politik.
- 4) D *Input* menjadi *output*.
- 5) D Mengatur dan mengintegrasikan semua tindakan dalam sistem.

Tes Formatif 2

- 1) A *Output* dan sosialisasi sebagai mekanisme dukungan.
- 2) A Pembaharuan dukungan.
- 3) A Semua sistem sosial dan fisik yang berada di luar sistem politik, akan tetapi masih berada dalam masyarakat yang sama.
- 4) D Sistem ekonomi internasional.
- 5) B Hanya mengedepankan nilai liberal.

Tes Formatif 3

- 1) D Sosiologi.
- 2) B Struktur dan fungsi politiknya.
- 3) D Pembuatan peraturan.
- 4) A Responsif.
- 5) D Sistem, struktur, dan fungsi.

Tes Formatif 4

- 1) A Bentuknya.
- 2) D Tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang semuanya bersifat modern serta yang tradisional dikatakan semuanya primitif.
- 3) A Masyarakat.
- 4) C Tidak membantu kita dalam membandingkan sistem politik dengan sistem yang lain.
- 5) A Lembaga politik.

Glosarium

1. ***Input*** : Masukan untuk sistem politik.
2. ***Output*** : Hasil, produk, atau keluaran.
3. ***Withinput*** : sesuatu yang timbul sebagai akibat langsung dari sistem politik itu sendiri.
4. ***Feedback*** : Arus balik.
5. **Lingkungan** : semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik.
6. **Artikulasi kepentingan** : Perumusan kepentingan.
7. **Agregasi kepentingan** : Penggabungan kepentingan.
8. ***Intrasocietal*** : Komponen dalam suatu sistem politik.
9. ***Extrasocietal*** : Semua sistem di luar sistem politik.
10. **Kapabilitas** : Kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam ataupun luar.
11. **Sosialisasi politik** : Proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh dan dibentuk. Sosialisasi politik menjadi sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
12. **Komunikasi politik** : Pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan pesan yang mempunyai pengaruh (*impact*) yang signifikan terhadap politik.
13. **Rekrutmen politik** : Suatu proses di mana pengerahan, pencarian, dan pengajakan anggota masyarakat untuk aktif dalam kegiatan politik.

Daftar Pustaka

- Almod, Gabrield and James S. Coleman. (1960). *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press.
- Budiardjo, Miriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Easton, David. (1984). *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Easton, David. (1992). *Aproaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Hadaad, Ismid (ed.). (1981). *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Mas`oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. (1991). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (eds.). (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Rauf, Maswadi. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, Toto Pribadi, dan Zulkifli Hamid. (1995). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

[Kembali ke daftar isi](#)